

# Internet dan Kualitas Ruang (Peradaban) Publik Masyarakat Nusantara: Sebuah Kajian Konseptual

Aurelius Teluma<sup>#</sup>

<sup>#</sup> *Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta*  
*E-mail: aureliusteluma@yahoo.com*

---

**Abstrak** — Karakter konektivitas, interaktivitas dan keterbukaannya membuat internet dianggap sebagai ruang publik baru di jagat maya. Namun asumsi ini perlu ditakar untuk memberikan pemahaman yang komprehensif akan sifat kepublikan ruang jagat maya tersebut khususnya dalam konteks masyarakat multikultur Indonesia. Tulisan ini merupakan sebuah kajian konseptual yang bermaksud mendiskusikan karakteristik ruang publik masyarakat internet Indonesia tersebut secara filosofis berbasis beberapa hasil riset tentang internet dan politik di Indonesia.

**Kata Kunci** — *Internet, ruang publik, Indonesia, pluralitas*

---

## I. PENDAHULUAN

Alkisah, setelah di alam baka, Hosni Mubarak, Anwar Sadat, dan Gamal Abdul Nasser berkumpul. Sembari meminum teh, Mubarak bertanya kepada Nasser, “Bagaimana kamu bisa naik ke sini?” “Karena racun,” jawab Nasser. Mubarak lalu berpaling ke Sadat dan bertanya, “Lalu kamu?” “Karena peluru seorang pembunuh” jawab Sadat. Sadat dan Nasser segera berpaling ke Mubarak dan bertanya, “Kalau kamu?” Mubarak pun menjawab, “Facebook.” Cerita lucu tersebut beredar di Mesir setelah lengsernya Mubarak pada tanggal 11 Februari 2011 silam (dalam Lim, 2012). Anekdote tersebut hanya untuk memberikan gambaran bagaimana peran media sosial dalam memobilisasi gerakan warga menentang rezim Mubarak.

Kisah kuatnya pengaruh media sosial dalam sebuah gerakan sosial-politik tidak hanya ada di Mesir. Para pengguna media sosial di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012 yang lalu berhasil “membuat” sejumlah gerakan sosial yang justru menjadi “berita” untuk media *mainstream* di tanah air. Peristiwa terakhir yang masih membekas adalah ketika menjelang tengah malam, pada hari ulang tahun TNI, 5 Oktober 2012, ratusan “Semut Rangrang” mengerubungi Kantor KPK untuk membentenginya dari serangan “Buaya” yakni sekelompok polisi yang hendak menahan salah seorang penyidik KPK. Kehadiran para “Semut Rangrang” itu diliput secara *live* oleh sejumlah stasiun televisi. Tengah malam itu juga, KPK dan Polri sama-sama melakukan siaran pers. Suasana semakin mencekam, peristiwa itu semakin bernilai berita. Tak hanya menjadi berita terhangat tengah malam, keesokan harinya, hampir semua surat kabar menjadikannya sebagai *headline news*. Fantastis!

Oleh banyak kalangan, peristiwa Semut Rangrang vs Buaya tersebut dirayakan sebagai pertanda

lahirnya ruang publik baru yang ditandai oleh besarnya partisipasi aktif warga berkat kehadiran internet dan atau media sosial (Kompas, 26/12/2012; Ningrum, 2012). Pandangan dan harapan tersebut semakin besar jika menilik data bahwa jumlah pengguna internet meningkat tajam pada setiap tahun. Sebagai contoh, data empat tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2008 pengguna internet sebanyak 7,7% dari seluruh penduduk Indonesia, 2009 naik menjadi 8,4% dan tahun 2010 melonjak hingga 18,5% (Nugroho, et al., 2012: 87; Lim, 2011: 4) dan tahun 2011 mencapai 22,4% (Ningrum, 2012: 7). Saat ini, secara faktual, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2014 terdapat 88,1 juta atau sebanyak 28% pengguna internet dari 252,4 juta penduduk Indonesia (APJII, 2015: 22).

Apa yang paling banyak dilakukan oleh para *user* di Indonesia ketika berinternet? Jawaban menurut APJII: mengakses situs jejaring sosial (2015: 32). Secara rinci, dari keseluruhan jumlah pengguna internet Indonesia tersebut, 87,4% menggunakan internet untuk mengakses media sosial (situs jejaring sosial), 68,7% untuk mencari informasi (*searching/browsing*), 59,9% untuk berkirim pesan instan (*instant messaging*), 59,7% untuk mencari berita terkini, 27,3% untuk *video streaming download/upload* video, 25,4% untuk berkomunikasi dengan email, dan keperluan lainnya berada di bawah 10%.

Sekalipun demikian, apakah fenomena munculnya gerakan sosial yang diakselerasi oleh penggunaan media sosial serta pesatnya jumlah pengguna internet ini menjadi indikasi bahwa penggunaan internet di negeri ini semakin memperkuat kualitas ruang publik Indonesia dalam arti Habermasian? Sejauh mana internet di Indonesia dapat disebut sebagai ‘ruang publik baru’ atau

alternatif tempat diskursus publik dan rasional berlangsung? Sejauh mana 'kualitas' ruang publik bentukan internet di negeri ini? Dan jika telah mencapai taraf 'kepublikan' tertentu, bagaimana mentransformasi sistem media internet tersebut agar semakin berkarakter 'ruang publik?' Inilah rangkaian pertanyaan yang hendak didiskusikan dalam tulisan ini.

Agar tidak terjatuh dalam pandangan tekno-utopian yang begitu optimis bahwa internet mengakselerasi demokratisasi warga hingga menciptakan ruang publik atau sebaliknya menjadi tekno-disutopian yang pesimis pada kemajuan internet, maka tulisan ini akan melihat secara realistis kaitan antara praktik sosial berinternet di Indonesia dengan kualitas ruang publik tanah air (DiMaggio, Paul et.al. 2001). Fokus pada aspek riil ini bertujuan agar pembahasan tidak hanya soal bagaimana internet memperlancar diskusi politik secara *online* tetapi juga soal bagaimana diskusi yang difasilitasi tersebut berkontribusi pada praksis berdemokrasi. Untuk memberikan kerangka pembahasan, praktik sosial berinternet yang dimaksud adalah pelbagai hal soal penggunaan internet pada segi perbedaan akses informasi, efek luasnya jangkauan, paradoks kepentingan komersial di dalamnya serta kebijakan atas segi-segi berinternet tersebut.

## II. DISKUSI

Diskusi ini akan diawali dengan kajian teoritik tentang ruang publik dan hubungannya dengan media internet dengan konteks Indonesia, diakhir dengan agenda transformasi sistem media online dengan aplikasi perspektif strukturasi Giddens.

### A. Ruang Publik: Sekilas Kajian Teoritis

Setelah filsuf politik Yunani Kuno, Aristoteles (384-323 SM) membahasnya secara implisit, setidaknya ada dua pemikir sosial dan politik kontemporer yang secara eksplisit berbicara tentang konsepsi ruang publik (*public sphere*) yakni Hannah Arendt (1906-1975) dan Jürgen Habermas (1929-sekarang). Dalam karyanya, *Politics*, Aristoteles membedakan adanya dua ruang dalam hidup bermasyarakat yakni *oikos* atau rumah tangga dan *polis* atau negara kota (Schmandt, 2009: 89; Hardiman, 2005: 25-26). Di dalam *oikos* hanya ada hubungan menguasai-dikuasai di bawah payung tuan-budak, laki-laki-perempuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis. Sebaliknya, *polis* merupakan ruang publik yang terbentuk dari relasi-relasi isonomis warganya yang bersuara lantang memberikan aspirasinya. Karena itu, hanya warga yang rasional dan mau berdiskursus yang layak berada di ruang publik atau *polis*.

Menghidupkan kembali gagasan antik tersebut, Hannah Arendt, filsuf keturunan Yahudi-kelahiran Jerman-tinggal di Amerika, melalui karyanya *The*

*Human Condition* (1959) membangun gagasannya tentang ruang publik yang dibedakannya dari ruang privat. Sebelumnya, Arendt membedakan terlebih dahulu perbedaan aktivitas manusia (*vita activa*) yang terdiri dari kerja (*labor*), karya (*work*), dan tindakan (*action*). Pada level kerja, manusia melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan biologis sehingga tak lebih dari animal laborans atau binatang yang bekerja. Pada level karya, manusia sudah bisa disebut *homo faber* atau yang menghasilkan sesuatu namun masih untuk melayani kepentingan pasar sehingga memperlalat dan diperlalat orang lain.

Bagi Arendt, manusia politis yang ideal adalah yang berada pada level *action* atau tindakan. Menurutnya, tindakan merupakan satu-satunya aktivitas manusia yang berlangsung di antara manusia tanpa perantara, penuh kebebasan dan pengakuan akan pluralitas. Tindakan berhubungan dengan pluralitas karena kenyataannya adalah bahwa manusia (*men*) dan bukan Sang Manusia (*The Man*) yang hidup di bumi dan tinggal di dunia; "*Plurality is the condition of human action because we are all the same, that is, human, in such a way that nobody is ever the same as anyone else who ever lived, lives, or will live*" (hlm 10). Pada tindakan, tak ada mekanisme alat-memperlalat karena meniscayakan relasi resiprokal-dialogis-komunikatif antar agen yang plural sekaligus bebas dan setara—seperti retorika dan perdebatan pada era Aristoteles. Berkaitan dengan pembedaan ruang privat dan ruang publik, kerja dan karya berada dalam kondisi ruang privat sedang hanya tindakan yang ada di ruang publik. Dengan kata lain, hanya manusia yang bertindak inilah yang dapat melahirkan ruang publik! Dengan demikian, ruang publik adalah ruang pengakuan akan kebebasan, pluralitas dan kesetaraan oleh karena kehendak untuk berdiskursus secara rasional dan fair tanpa muslihat alat-memperlalat!

Habermas melanjutkan pemikiran Arendt ini sambil mengkritik Arendt sangat keras sebagai penggagas demokrasi utopis dengan mengikuti romantisme Yunani Kuno (dalam d'Entrevies, 2004: 99-100). Menurut Habermas ruang publik merupakan prosedur menuju demokrasi yang ideal yakni demokrasi deliberatif (Hardiman, 2009). Gagasan ruang publik Habermas dimulai dengan induk pemikiran filosofisnya tentang perbedaan antara tindakan komunikatif dan tindakan strategis. Jika tindakan strategis adalah tindakan yang memakai pihak lain sebagai instrumen meraih tujuan maka tindakan komunikatif menunjuk pada interaksi sekurangnya antar dua subyek yang mampu (*capable*) berbicara dan bertindak untuk mengarah kepada persetujuan (Habermas, 1984: 86). Tindakan yang menjadi pembangun ruang publik adalah tindakan komunikatif.

Ruang publik politis menurut Habermas adalah 'ruang antara' atau ruang demokratis tempat para warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif (Hardiman, 2009: 125 dst). Ruang publik tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif para warganegara berlangsung. Ruang publik politis itu dipahami Habermas sebagai prosedur komunikasi. Ruang publik memungkinkan para warga negara bebas menyatakan sikap karena ruang tersebut menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warga negara menggunakan kekuatan argumentasi. Hakekat ruang publik politis pertama-tama adalah kondisi-kondisi komunikasi dan bukan institusi atau organisasi tertentu. Dengan demikian, peran utama ruang publik adalah untuk integrasi masyarakat secara sukarela karena digerakkan oleh solidaritas kewargaan (*civic solidarity*). Habermas menulis, "*In modern societies, one particular social space—namely, political public sphere of democratic community—acquires an especially important symptomatic role in the integration of society*" (Habermas, 2008: 21-22).

Dengan beberapa gagasan teoritis tentang ruang publik ini, bagaimana cara kita memandang atau menilai 'kepublikan' internet di negeri ini?

### **B. Internet dan Ruang (Peradaban) Publik Nusantara**

Secara singkat, karakteristik sebuah ruang publik adalah keniscayaan kehadiran diskursus rasional, resiprokal, dialogis, dengan mempertahankan kesetaraan dan keberagaman untuk meraih sebuah konsensus yang mendukung terciptanya kesejahteraan umum (*pro bonum commune*). Secara sosiologis, istilah 'publik' merujuk pada kewargaan (*citizenship*), kebersamaan (*commonality*) atau sesuatu yang bukan privat (Papacharissi, 2002: 10). Menurut Papacharissi, dalam konteks ruang publik, internet hadir sebagai ruang publik baru yang sekaligus bersifat sebagai 'arena publik' (*public space*) atau arena virtual (*virtual space*) dan 'ruang publik' (*public sphere*) atau ruang virtual (*virtual sphere*). Sebagai arena publik, internet menjadi forum yang lain bagi deliberasi politik. Sedangkan sebagai ruang publik, internet dapat memfasilitasi diskusi yang mendorong pertukaran ide dan opini yang demokratis; "*A virtual space enhances discussion; a virtual sphere enhances democracy*" (hlm. 11).

Papacharissi mengajukan beberapa pedoman untuk menilai kadar kepublikan *virtual sphere* penggunaan internet (hlm. 12) dengan beberapa pertanyaan: apakah internet merepresentasikan kolektivitas aneka kelompok yang berbeda? Apakah diskusi di dunia maya tersebut didominasi oleh anarki atau keharmonisan dan keduanya mendorong

demokrasi? Apakah ada kemungkinan bahwa karakter revolusioner internet tersebut dapat dipelintir oleh budaya komersial modern? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diterapkan pada aspek berikut khususnya di Indonesia: aksesibilitas warga pada keberagaman informasi internet, potensi internet untuk menanggung keberagaman penggunaannya, dan masa depan internet dalam era kapitalisme ini.

#### *1) Masalah akses informasi*

Fokus perhatian kebanyakan penelitian tentang kepublikan internet (DiMaggio et al, 2001: 310) adalah soal ketidaksetaraan akses warga pada internet yang tidak saja menunjukkan realitas ketidaksetaraan di tengah masyarakat tetapi juga menjadi agen yang mereproduksi ketidaksetaraan tersebut karena 'kesenjangan digital' (*digital divide*). Sebaliknya, dari perspektif utopian, kesetaraan akses dapat menjamin kesetaraan di tengah masyarakat. Benarkah demikian? Benar dan tidak!

Konektivitas antar warga melalui internet tidak serta-merta menunjukkan lebih representatif dan setaranya warga sebagai pertanda sehatnya ruang publik. Internet memang memperluas dan memperbanyak diskusi politik tetapi secara online. Yang dibutuhkan tidak hanya online karena hanya akan jatuh pada apa yang disebut Yanuar Nugroho sebagai *click activism* alias hanya menjadi aktivis di dunia maya (2011: 80). Tanpa sebuah komitmen konkrit pada apa yang sudah diungkapkan secara online maka gagasan internet sebagai ruang publik hanyalah "*harbors an illusion of openness*" atau pelabuhan-pelabuhan ilusi akan keterbukaan (Pavlik dalam Papacharissi, hlm. 14).

Bagaimana dengan persoalan aksesibilitas internet dan ruang publik di Indonesia? Dalam disertasinya di University of Twente, tentang internet dan aktivisme di Indonesia (2005), Merlyna Lim mengapresiasi bahwa internet sejak kehadirannya di Indonesia sekitar awal tahun 1990-an menjadi salah satu agen penting dalam memperbesar aktivisme politik warga yang mendorong pula cepatnya tuntutan akan reformasi (lihat juga Lim, 2003: 273). Dan jika sekarang melihat pesatnya jumlah warga Indonesia yang mengakses internet, maka harapan agar internet memperbesar ruang publik negeri ini cukup beralasan. Namun, jika mencermati data riil soal akses internet di negeri ini, maka harapan tersebut mungkin harus disimpan dan diucapkan secara lirih dahulu. Betapa tidak, kesenjangan akses masih sangat lebar dan kesenjangan itu berkelindan juga dengan keterbelakangan pada sektor lain.

Penelitian Lim tahun 2011 (hlm. 4) mengatakan bahwa internet di Indonesia masih sebatas konsumsi kaum kelas menengah perkotaan di Indonesia. Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 juga menyatakan bahwa populasi pengakses internet

selama tahun 2010 didominasi oleh penduduk perkotaan; 17,74% di perkotaan dan 4,16% (dalam Nugroho, et al., 2012: 113). Tentu saja, populasi pedesaan yang mengakses internet tersebut pasti pedesaan di Jawa, dan sedikit di Sumatera serta Bali. Di luar itu, pasti hampir tak lebih dari 0,5 persen dari 4,16 % tersebut! Lihat saja data akses internet warga menurut propinsi tahun 2010 yang juga dikeluarkan BPS: DKI Jakarta tertinggi yakni sebanyak 26,73% dan paling rendah NTT dengan 3,78%. Dan jika data pada propinsi NTT tersebut disandingkan dengan data statistik angka kemiskinan bahwa NTT masih menjadi propinsi termiskin di nusantara ini tahun 2012 yang baru saja “dimahkotai” oleh BPS pada 2 Januari 2012 yang lalu, maka menjadi terang-benderang korelasi ketidaksetaraan akses informasi dengan perkembangan ekonomi wilayah!

Jika kembali kepada skeptisisme Papacharissi, bahwa konektivitas tidak menjamin hadirnya ruang publik, maka tidak naif—dari perspektif akses media—jika disimpulkan bahwa salah satu faktor penting yang mereproduksi kemiskinan NTT tersebut adalah akibat dari kecilnya konektivitas pada internet atau informasi. Benar pernyataan Manuel Castells yang terus mengusung konsepnya tentang network society sebagai struktur sosial masyarakat era informasi di mana network menjadi kondisi sosial, politik, ekonomi bahkan budaya global; *network society as a social structure* (2005: 6), bahkan “*formal structure*” (hlm. 7). Internet di Indonesia memang memperbesar diskusi politik menuju terwujudnya demokrasi deliberatif tetapi asumsi tersebut (masih) berlaku untuk wilayah tertentu di republik ini. Studi per wilayah menjadi perlu jika ingin mengkaji dampak internet pada transformasi ruang publik Indonesia.

## 2) Berhadapan dengan pluralitas

Internet memungkinkan seseorang terkoneksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda bahkan di belahan dunia lain lalu mereka terlibat dalam sebuah forum diskusi politik. Kaum utopian optimis bahwa internet dapat menumbuhkan demokrasi dari akar rumput dengan latar belakang yang berbeda. Unsur anonimitas di internet justru dapat mempermudah penyatuan manusia multi kultur tersebut oleh karena anonimitas tersebut membuat para user lebih bebas berbicara. Sebaliknya, bagi kaum disutopian, arena virtual tidak menjamin berlangsungnya diskursus yang demokratis dan rasional. Hal ini berkaitan dengan efek paradoks internet tersebut; semakin luas menjangkau beragam kelompok, semakin banyak pula kelompok-kelompok kecil yang terbentuk berdasarkan kultur, minat bahkan ideologi tertentu. Menurut Thomas Ruggiero (dalam Baran & Davis, 2010: 295-296), munculnya internet membangkitkan kembali teori uses and gratification karena semakin meniscayakan

kehadiran khalayak aktif (*active audiences*). Bukan hanya itu, bertumbuh pula proses yang disebutnya dengan demasifikasi (*demassification*). Dengan kata lain, efek globalitas internet berbanding lurus dengan efek lokalitasnya. Munculnya grup dengan afiliasi ideologi tertentu termasuk unsur-unsur primordial seperti etnis, agama dan tradisi bahkan ras terlihat di arena virtual. Marshall McLuhan menyebut fragmentasi khalayak era digital ini sebagai “suku-suku digital” (*digital tribes*) yang bisa menghidupkan kembali mentalitas perang suku (*tribal warfare mentality*) sebagaimana manusia pada era tribal (dalam Griffin, 2012: 327-328).

Bagaimana nasib keberagaman di tengah masyarakat internet Nusantara Indonesia? Ketika pertama kali menuliskan perihal perkembangan dan dampak internet di Indonesia dalam jurnal internasional tahun 2002, Merlyna Lim menyitir bahwa internet berkembang dari yang semula dikekang pengawasan (panopticon) menjadi kacau-balau penuh hiruk-pikuk (pandemonium). Bersamaan dengan perannya menggerakkan aktivisme politik mengakselerasi reformasi, internet juga dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mempertegas identitas lokal bahkan ideologi radikal anti-liyan. Dalam disertasinya, Lim (2005a) menunjukkan bagaimana internet dimanfaatkan baik oleh kelompok Islam maupun Kristen dalam rangka ‘mengobarkan’ kerusuhan beraroma SARA di Ambon pada tahun 1999-2000 silam. Menulis untuk East-West Center di Washington (2005b), Lim juga memetakan sejumlah situs lokal Indonesia, yahoo.group maupun blog dan website dari golongan Islam radikal yang mengusung anti-pluralisme dan anti-Amerika (lih. Hlm. 61-62).

Sekalipun demikian, dalam penelitiannya pada tahun 2009, yang berfokus pada analisis terhadap wacana sejumlah blogger Islam Indonesia terhadap isu yang berkaitan dengan Islam seperti perang Israel-Palestina, kemunculan film Fitna di Belanda dan RUU Anti Pornografi dan Pronoaksi, Lim menyimpulkan bahwa sekalipun ada solidaritas global sebagai satu ummah namun para blogger Islam tersebut tetap menyadari identitas kebangsaan dan kesukuan mereka. Pada penelitiannya tahun 2011, ia melihat adanya geliat ke arah yang lebih berani berkaitan dengan diskusi tentang pluralitas dengan kemunculan sejumlah website LSM tertentu yang mengusung masalah multikultur dan pluralitas dalam bungkusan isu Hak Asasi Manusia (HAM)—dan sejauh pengalaman penulis ada pula beberapa grup diskusi online yang terang-terangan “mengupas-tuntas” perihal perbedaan SARA; salah satunya adalah yang penulis ikuti: <http://www.facebook.com/groups/majalahbhinneka/> yang pada tanggal 6 Januari 2012 memiliki 8.462 anggota. Dalam hal penerimaan pluralitas, efek diskusi internet di Indonesia cukup memberikan harapan.

### 3) Di hadapan komersialisasi

Bagaimanapun, teknologi internet dan berbagai inovasi yang dikembangkan bersamanya adalah media yang diproduksi dalam era kapitalisme! Maka seiring dengan lirikan ilmuwan sosial akan dampak internet untuk memperkuat partisipasi warga, maka muncul pula lirikan dari pebisnis terutama para korporat media, bahwa internet merupakan media dan ladang bisnis yang menjanjikan profit besar. Logika kapitalisme dan struktur sosial-ekonomi kapitalis akan berjuang pula memodifikasi teknologi baru ini dengan orientasi komersial. Di Indonesia, isu konglomerasi dan komersialisasi media tak hanya santer tetapi juga seakan tak sanggup lagi dikalahkan. Saat ini, terdapat 12 kelompok industri media besar yang mengendalikan kanal media di Indonesia (Nugroho, et al., 2012a; 2012b; Lim, 2011).

Media online yang diharapkan memungkinkan independensi warga dari pengaruh media mainstream pun tak luput dari incaran para konglomerat media tersebut. Mereka menciptakan pula versi online dari kanal-kanal cetak, audio dan visual mereka. Ada media besar yang menyediakan blog gratis sehingga dapat menjadi seperti media bagi *citizen journalism*. Namun, jika memperhatikan isinya bahwa kebanyakan blogger di laman tersebut masih mengutip berita atau data dari ‘media induk’, maka di dunia maya pun, informasi masih dominan sama dengan versi yang diproduksi oleh media mainstream.

### III. PENUTUP

Dari ketiga aspek yang diuraikan tersebut, menjadi jelas bahwa sekalipun internet di Indonesia menghadirkan arena virtual yang menjadi medan diskusi warga secara online, namun ruang tersebut tidak setara dengan ruang publik Habermasian. Dengan memperhatikan ketidaksetaraan akses, maka dapat dikatakan—dalam rumusan Habermas—arena virtual di Indonesia masih didominasi oleh para ‘borjuis komputer berinternet.’ Pertanyaannya, dari mana memulai agenda transformasi sistem media di Indonesia?

Sistem dalam perspektif ilmu sosial diartikan sebagai kumpulan antar bagian yang saling terhubung dan saling mempengaruhi serta saling mengontrol melalui komunikasi dan putaran timbal-balik (Baran & Davis, 2010: 215). Dalam perspektif Giddens, sistem sejatinya adalah proses strukturasi, di mana ia sekaligus sebagai sarana dan sumber daya yang memproduksi dan mereproduksi praksis sosial dan pemaknaannya (dalam Herry-Priyono, 2002). Dengan demikian, agenda pertama transformasi sistem media online Indonesia adalah bagaimana membuat internet menjadi sarana sekaligus resources yang memperkuat ruang publik (baca: demokrasi deliberatif) Indonesia melalui kemudahan berinteraksi dan berdialog di antara mereka yang tinggal di 17-an ribu pulau nusantara ini.

Mengikuti tiga pintu masuk menakar kepublikan internet yakni aksesibilitas, ramah pada pluralitas serta peInfrastruktur penghapus “jurang digital” harus segera dibangun sebagaimana agenda Kemenkominfo bahwa akan menjadi negeri ini menjadi negeri digital.

Dengan demikian, masih dibutuhkan waktu yang lama, agar bisa, jika kelak di alam baka, ketika bangku-bangku pada angkringan tempat “nonkrong” Hosni Mubarak, Anwar Sadat, dan Gamal Abdul Nasser tadi berganti “ditongkrongi” oleh orang-orang Indonesia dari Jawa, Flores, Papua, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, lalu saling bertanya, faktor apa yang membuat mereka masih bisa bersama dalam kesetaraan baik di dunia nyata maupun di dunia baka, lalu serempak mereka menjawab: internet! Jika saat ini mereka saling bertanya, maka jawabannya pasti berbeda!

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] S APJII. 2015. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*. Jakarta: APJII
- [2] Arendt, H. 1959. *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- [3] Baran, S.J. & Dennis K. Davis. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Terj. 5th Ed. Jakarta: Salemba Humanika.
- [4] Habermas, J. 1984. *Reason and the Rationalization of Society: The Theory of Communicative Action Vol I*, terj. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.
- [5] Habermas, J. 2008. *Between Naturalism and Religion*, terj. Ciaran Cronin. Cambridge: Polity Press.
- [6] Hardiman, F. B. 2005. *Memahami Negativitas*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [7] Hardiman, F.B. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- [8] Castells, M & Gustavo Cardoso. (Eds.), 2005. *The Network Society From Knowledge to Policy*. Washington DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.
- [9] d’Entreves, M.P. 1994. *The Political Philosophy of Hannah Arendt*. New York: Routledge.
- [10] DiMaggio, Paul et.al. 2001. Social Implications of the Internet. *Annual Review of Sociology*.
- [11] Lim, M., 2002. Cyber-civic Space. From Panopticon to Pandemonium? *International Development and Planning Review* 24(4), 383-400.
- [12] Lim, M., 2003a. From Real to Virtual (and Back again): The Internet and Public Sphere in Indonesia, dalam Ho, K.C., Kluver, R., Yang, K. (Eds.), *Asia Encounters the Internet*. Routledge, London, hlm. 113-128.
- [13] Lim, M., 2003b. The Internet, Social Networks and Reform in Indonesia, dalam: Couldry, N., Curran, J. (Eds.), *Contesting Media Power. Alternative Media in a Networked World*. Rowman & Littlefield, Oxford, hlm. 273-288.

- [14] Lim, M., 2004. Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia. *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology* 27(73), 1-11.
- [15] Lim, M., 2005a. *Islamic radicalism and anti Americanism in Indonesia: The role of the Internet*. Washington, DC: East West Center.
- [16] Lim, M., 2005. @rchipelago Online: Internet and Political Activism in Indonesia. *Thesis*. Enschede: University of Twente.
- [17] Lim, M., 2006. Cyber-urban activism and political change in Indonesia. *Eastbound*, 1(1), 1–19.
- [18] Lim, M., 2009. Muslim voices in the blogosphere: Mosaics of local-global discourses. dalam G. Goggin & M. McLelland (Eds.), *Internationalizing Internet: Beyond Anglophone paradigm* (pp. 178–195). London, England: Routledge
- [19] Lim, M., 2011. @crossroads: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia. Report. Research collaboration of Participatory Media Lab and Ford Foundation. Arizona: Arizona State University and Ford Foundation.
- [20] Ningrum, D., 2012. Analisis Kebutuhan Media Alternatif Baru Guna Mengangkat/Menyampaikan Informasi Publik. ICT Watch. *Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita*. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan HIVOS Jakarta, hal. xx.
- [21] Nugroho, Y., 2011a. Citizens in @ction: Collaboration, participatory democracy and freedom of information – Mapping contemporary civic activism and the use of new social media in Indonesia. Report. Manchester & Jakarta: MIOIR and HIVOS..
- [22] Nugroho, Y., Siregar, M.F., Laksmi, S., 2012a. *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia*. Laporan Berseri: Empowering Society Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia.
- [23] Nugroho, Y., Siregar, M.F., Laksmi, S., 2012a. *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia*. Laporan Berseri: Empowering Society Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia.
- [24] Papacharissi, Z. 2002. The virtual sphere: The internet as a public sphere. *New Media & Society*. Vol 4 (1): 9-27..
- [25] Schmandt, H.J. 2009. *Filsafat Politik*. Terj. Ed.III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.